

Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal

<http://dx.doi.org/10.18196/jgp.2012.0007>

Muhtar Haboddin

Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya, Malang. *Email:*

muhtar_76@yahoo.com

ABSTRACT

The strengthening of identity politics in the local domains happens together with political decentralization. Post-enactment of Law 22/1999, identity politics movements is more clearly . In fact, Many actors both local and national politics are consciously using this issue in the power-sharing. This research use literature review as method in analysis. Identity politics In Riau, Central Kalimantan, West Kalimantan and Irian Jaya, which is become the focus of this study, are show how strength this issue. This issue used by political actors when dealing with other political entities.

Keywords: Identity politic, Local politic actor, Power distribution

ABSTRAK

Menguatnya politik identitas di tingkat local terjadi bersamaan dengan politik desentralisasi. Pasca penetapan UU No. 22/1999, gerakan politik identitas semakin jelas. Faktanya, banyak aktor baik lokal dan politik nasional menggunakan isu ini secara intens untuk pembagian kekuasaan. Penelitian ini menggunakan studi pustaka sebagai analisisnya. Politik identitas yang terjadi di Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Irian Jaya, yang menjad focus kajian dalam artikel ini, menunjukkan kuatnya isu ini. Isu ini digunakan oleh aktor politik ketika melakukan negosiasi dengan entitas politik lainnya. Kata kunci: Politik identitas, Aktor politik lokal, Pembagian kekuasaan.

PENDAHULUAN

Dengan nada provokatif Cornelis Lay (2003) menulis: *Jakarta Berkata,*

Akulah Indonesia. Sebuah kalimat yang menunjukkan bahwa Jakarta sangat perkasa. Bahkan Jakarta bisa secara terang-terangan mengidentikkan dirinya sama dengan Indonesia. Propaganda politik semacam itu sangat cocok tatkala negara ini masih dikelola dengan semangat otoriter-sentralistik di bawah kepemimpinan Soeharto.

Namun seiring berjalannya waktu, format tata kelola pemerintahan berganti yakni dari otoriter-sentralistik menjadi desentralisasi-demokratik—kalimat yang bernada *Jakarta berka-ta, akulah Indonesia* patut dipertanyakan relevansinya dalam konteks politik Indonesia kontemporer. Mengapa demikian? Karena sejarah pengelolaan pemerintah pasca Orde Baru mencatat, bahwa beberapa daerah sudah menunjukkan dirinya untuk melakukan perlawanan maupun gugatan terhadap eksistensi Jakarta pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Hal ini nampak sebagaimana diekspresikan oleh beberapa daerah seperti Riau dan Kalimantan yang meminta merdeka di satu sisi. Sementara di sisi yang lain Papua dan Aceh masih diselimuti keinginan yang kuat untuk memisahkan diri dari bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Nada gugat maupun perlawanan empat daerah ini terhadap dominasi pemerintah Jakarta berimplikasi pada pola pengaturan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sebagai contoh, pemberian otonomi khusus kepada Papua dan Aceh. Pemberian otonomi khusus Jakarta kepada dua daerah tersebut, sama dengan merayakan kekalahan dan memudarnya kekuasaan Jakarta terhadap Daerah.

Bersamaan dengan memudarnya kekuasaan Jakarta terhadap daerah. Bangsa ini pun kembali tersentak dengan munculnya gerakan kedaerahan dengan mengambil setting politik etnisitas yang merupakan bagian dari politik identitas sebagai basis gerakan politiknya. Bahkan, disinyalir oleh banyak pengamat bahwa gerakan politik identitas kian banyak dipakai oleh para politisi dan penguasa di tingkat lokal untuk mendapatkan kue kekuasaan, baik bidang politik maupun ekonomi.

Menguatnya politik identitas di ranah lokal bersamaan dengan politik desentralisasi. Pasca pemberlakuan UU No. 22/1999, gerakan politik identitas semakin jelas wujudnya. Bahkan, banyak aktor politik lokal maupun nasional secara sadar menggunakan isu ini dalam *power-sharing*. Di Provinsi Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Irian Jaya

yang secara nyata menunjukkan betapa ampuhnya isu ini digunakan oleh aktor-aktor politik, ketika berhadapan dengan entitas politik lain.

Oleh karena itu, politisasi identitas yang dilakukan oleh para elit lokal di empat daerah benar-benar dikreasi sedemikian rupa supaya mereka yang awalnya tersingkir dari pusat-pusat kekuasaan bisa masuk dan menikmati kekuasaan. Tentu saja, cara kerja dari proyek politik identitas di empat daerah diekspresikan dalam bentuk yang bervariasi. *Pertama*, politik identitas dijadikan basis perjuangan elit lokal dalam rangka pemekaran wilayah terjadi di Provinsi Kalimantan Barat dan Irian Jaya. *Kedua*, politik identitas yang dicoba ditransformasi ke dalam entitas politik dengan harapan bisa menguasai pemerintahan daerah sampai pergantian pimpinan puncak. Atau dalam istilah Gerry Van Klinken (2007) disebut elit lokal yang mengambalalih seluruh bangunan institusi politik lokal. Hal ini terjadi di Provinsi Riau–Kalimantan Tengah–Kalimantan Barat dan Irian Jaya. *Ketiga*, politik etnisitas digunakan untuk mempersoalkan antara ‘kami dan mereka’–‘saya’ dan ‘kamu’–sampai pada bentuknya yang ekstrim ‘jawa’ dan ‘luar jawa’–‘islam’ dan ‘kristen’. Dikotomi oposisional semacam ini sengaja dibangun oleh elit politik lokal untuk menghantam musuh ataupun rival politiknya yang *notabene* ‘kaum pendatang’. Poin ini terjadi di empat provinsi. *Keempat*, politik identitas dimobilisir untuk mendapat simpatik pemerintah yang lebih di atasnya. Dalamnya politisasi identitas di ranah lokal sebagaimana digambarkan di atas merupakan realitas politik yang harus diterima sekalipun dengan nada cemas. Mengapa cemas? Karena, ketika politisi identitas sudah terlanjur didemonstrasikan, sangat sulit untuk dikendalikan apalagi dikembalikan pada tempatnya semula. Karena itu, perlu dicarikan jalan tengah supaya penggusuran aktor politik–aktor ekonomi dan para birokrat tidak terjadi maka perangkat pengaturan *power-sharing* antar etnis–agama–suku perlu dilakukan.

Kerangka konseptual yang bisa ditawarkan dalam mengatasi rivalitas dan konflik di tengah menguatnya politik identitas di empat daerah tersebut adalah apa yang disebut Arend Lijphart (1977) sebagai *consociational democracy*. Bahkan, ilmuwan sekaliber Henk Schulte Nordholt dan Gerry Van Klinken (2007) dalam pengantar buku *Politik Lokal di Indonesia* dan Afan Gaffar (1990) masih meyakini bahwa demokrasi konsosiasional bisa mengurangi konflik identitas di ranah lokal.

Tulisan ini akan memaparkan bagaimana proses menguatnya politik identitas di ranah lokal khususnya di Provinsi Riau–Kalimantan Tengah–Kalimantan Barat dan Irian Jaya berlangsung. Pertama-tama, makalah ini akan memaparkan gagasan teoritik mengenai politik identitas, dilanjutkan dengan pelacakan apa penyebabnya. Pada bagian yang lain, dipaparkan pula praktek-praktek politik identitas pada masa Orde Baru yang tidak diberi ruang alias ditabukan oleh pemerintah tetapi pada masa reformasi politik identitas malah menguat. Sebelum ditutup, tulisan ini memberikan jalan tengah perihal penataan politik identitas sebagai jalan keluar yang bisa dilakukan oleh para aktor politik di tingkat lokal.

KERANGKA TEORITIK

1. Identitas Politik

Politik identitas mendapat tempat yang istimewa beberapa tahun terakhir. Dalam studi pasca-kolonial politik identitas sudah lama digeluti. Pemikir seperti Ania Loomba, Homi K. Bhabha dan Gayatri C Spivak adalah nama-nama yang biasa dirujuk. Mereka dirujuk karena sumbangsihnya dalam meletakkan politik identitas sebagai ciptaan dalam wacana sejarah dan budaya. Sementara dalam literatur ilmu politik, politik identitas dibedakan secara tajam antara identitas politik (*political identity*) dengan politik identitas (*political of identity*). *Political identity* merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam ikatan suatu komunitas politik sedangkan *political of identity* mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumber dan sarana politik.

Pemaknaan bahwa politik identitas sebagai sumber dan sarana politik dalam per-tarungan perebutan kekuasaan politik sangat dimungkinkan dan kian mengemuka dalam praktek politik sehari-hari. Karena itu para ilmuwan yang bergelut dalam wacana politik identitas berusaha sekuat mungkin untuk mencoba menafsirkan kembali dalam logika yang sangat sederhana dan lebih operasional. Misalnya saja Agnes Heller mendefinisikan politik identitas sebagai gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan sebagai suatu kategori politik yang utama. Sedangkan Donald L Morowitz (1998), pakar politik dari Universitas Duke, mendefinisikan:

Politik identitas adalah memberikan garis yang tegas untuk menentukan siapa yang akan disertakan dan siapa yang akan ditolak. Karena garis-garis penentuan tersebut tampak tidak dapat dirubah, maka status sebagai anggota bukan anggota dengan serta merta tampak bersifat permanen.

Baik Agnes Heller maupun Donald L Morowitz memperlihatkan sebuah benang merah yang sama yakni politik identitas dimaknai sebagai politik perbedaan. Konsep ini juga mewarnai hasil Simposium Asosiasi Politik Internasional di Wina pada 1994. Kesan yang lain dari pertemuan Wina adalah lahirnya dasar-dasar praktik politik identitas. Sementara Kemala Chandakirana (1989) dalam artikelnya *Geertz dan Masalah Kesukuan*, menyebutkan bahwa:

Politik identitas biasanya digunakan oleh para pemimpin sebagai retorika politik dengan sebutan kami bagi “orang asli” yang menghendaki kekuasaan dan mereka bagi “orang pendatang” yang harus melepaskan kekuasaan. Jadi, singkatnya politik identitas sekedar untuk dijadikan alat memanipulasi—alat untuk menggalang politik—guna memenuhi kepentingan ekonomi dan politiknya”.

Pemaknaan politik identitas antara Kemala dengan Agnes Heller dan Donald L Morowitz sangat berbeda. Kemala melangkah lebih jauh dalam melihat politik identitas yang terjadi pada tataran praktis. Yang biasanya digunakan sebagai alat memanipulasi—alat untuk menggalang politik guna kepentingan ekonomi dan politik. Namun, pada bagian yang lain, argumen Kemala mengalami kemunduran penafsiran dengan mengatakan bahwa: Dalam politik identitas tentu saja ikatan kesukuan mendapat peranan penting, ia menjadi simbol-simbol budaya yang potensial serta menjadi sumber kekuatan untuk aksi-aksi politik.

Pemahaman ini berimplikasi pada kecenderungan untuk: *Pertama*, ingin mendapat pengakuan dan perlakuan yang setara atau dasar hak-hak sebagai manusia baik politik, ekonomi maupun sosial-budaya. *Kedua*, demi menjaga dan melestarikan nilai budaya yang menjadi ciri khas kelompok yang bersangkutan. *Terakhir*, kesetiaan yang kuat terhadap etnistas yang dimilikinya. Selain tiga kecenderungan di atas Klaus Von Beyme (dalam Ubai Abdillah, 2002) menyebutkan ada tiga karakteristik yang melekat pada politik identitas, yakni; Gerakan politik identitas pada dasarnya membangun kembali “narasi besar” yang prinsipnya mereka tolak dan

membangun suatu teori yang mengendalikan faktor-faktor biologis sebagai penyusun perbedaan-perbedaan mendasar sebagai realitas kehidupannya; Dalam gerakan politik identitas ada suatu tendensi untuk membangun sistem apartheid terbalik. Ketika kekuasaan tidak dapat ditaklukkan dan pembagian kekuasaan tidak tercapai sebagai tujuan gerakan, pemisahan dan pengecualian diri diambil sebagai jalan keluar; Kelemahan dari gerakan politik identitas adalah upaya untuk menciptakan kelompok teori spesifik dari ilmu. Sebagai contoh, tidak seorangpun yang bisa menolak bahwa seorang hitam atau seorang sarjana wanita bisa jadi telah mempunyai pengalaman yang membuat mereka sensitif dalam kasus-kasus tertentu menyangkut hubungan dengan kelompok yang lain.

Dari tiga kriteria tersebut, selanjutnya Von Beyme (dalam Ubed Abdillah, 2002) membuat analisis lanjutan dengan melihat politik identitas melalui pola gerakan, motivasi dan tujuan yang ingin dicapai. Hasil dari analisis Von Beyme digambarkan melalui tabel berikut:

TABEL MODEL POLITIK IDENTITAS

| Model E-Governmnet | Interaksi antar Stakeholder |
|--|---|
| Pemerintah ke masyarakat (G2C) | Penyampaian pelayanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat. |
| Masyarakat ke pemerintah (C2G) | Memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antar masyarakat dan pemerintah. |
| Pemerintah ke bisnis (G2B) | Terdiri dari transaksi-transaksi elektronik dimana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah. Contoh, sistem <i>E-Procurement</i> . |
| Bisnis ke pemerintah (B2G) | Mengarah pada pemasaran produk dan jasa ke pemerintah untuk membantu pemerintah menjadi lebih efisien melalui misalnya, peningkatan proses bisnis dan manajemen data elektronik. Sistem <i>E-Procurement</i> adalah contoh aplikasi yang memfasilitasi baik interaksi G2B maupun G2G. |
| Pemerintah ke pegawai (G2E) | Terdiri dari inisiatif-inisiatif yang memfasilitasi manajemen pelayanan dan komunikasi internal dengan pegawai pemerintah. Contohnya, sistem manajemen SDM <i>online</i> . |
| Pemerintah ke pemerintah (G2G) | Memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi <i>online</i> antai departemen atau lembaga pemerintahan melalui basisdata terintegrasi. |
| Pemerintah ke organisasi nirlaba (G2N) | Pemerintah menyediakan informasi bagi organisasi nirlaba, partai politik atau organisasi sosial. |
| Organisasi nirlaba ke pemerintah (N2G) | Memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara pemerintah dan organisasi nirlaba, partai politik dan organisasi sosial. |

Sumber: Ubed Abdilah, 2002; 147

2. Konsep Etnisitas

Dari sudut pandang etimologis, etnis berasal dari bahasa Yunani 'ethnos' yang berarti 'penyembahan' atau pemuja berhala'. Di Inggris, terminologi ini digunakan mulai pertengahan abad XIV yang dalam perjalanannya mengalami reduksi ke arah penyebutan karakter ras. Sementara di Amerika Serikat, terminologi ini digunakan secara massif pada saat Perang Dunia I sebagai penghalus penyebutan bangsa-bangsa yang dianggap inferior. Meskipun terjadi perbedaan pandangan mengenai etnis, namun ditangan para ilmuwan politik konsepsi mengenai hakekat

etnisitas dimaknai dua hal: *Pertama*, pembacaan realitas perbedaan bentuk penciptaan, yaitu wacana batas yang bersifat oposisioner dan dikotomis. Kedua, suatu konstruksi pemahaman yang didasarkan atas pandangan dan bangunan sosial. Etnis merupakan konsep relasional yang berhubungan dengan indentifikasi diri dan askripsi sosial.

Dua makna ini bisa kita tarik sebuah pemahaman bahwa etnisitas selalu akan terbaca sebagai realitas perbedaan yang selalu dipandang dikotomis dalam mengidentifikasi diri. Karena itu identitas etnis relatif sulit diubah karena pemahaman ini dibangun di atas persamaan darah (kelahiran), warna kulit, kepercayaan yang mencakup 'suku', 'ras', 'nasionalitas' dan 'kasta'.

3. Melacak Politik Etnisitas di Indonesia

Jika bangunan pikir Prof. Henk S Nordholt (2007) diikuti sudah barang tentu kesimpulannya akan berkata bahwa *politik identitas merupakan bentukan dari Negara Orde Baru*. Pandangan ini senada dengan Rachmi Diah Larasati yang mengatakan bahwa '*negara sangat berperan dalam pembentukan politik identitas*'. Dua pandangan menguatkan pemahaman kita bahwa politik etnisitas merupakan kreasi negara yang monumental dalam rangka pelabelan warga negaranya. Pelabelan ini menjadi penting dalam urusan politik pengaturan atau bisa juga sebagai politik kontrol negara terhadap warganya untuk mengetahui 'siapa lawan' dan 'siapa kawan'. Pengaturan dan kontrol negara terhadap warganya tidak berhenti sampai di sini. Menurut pandangan Henk (2007) ada empat kebijakan yang dijalankan Orde Baru untuk melemahkan politik itnisitas di tanah air.

Pertama, tidak ada daerah yang asli. Maksud semua daerah terbuka sebagai daerah migrasi maupun transmigrasi sehingga semua komunitas tercerabut dari akar sosio-kultural dan politiknya. Kedua, pemerintah Orde Baru menghindari terbentuknya kelas karena itu persoalan SARA dikontrol sedemikian ketat. Dan yang berhak menggunakan SARA hanya pemerintah dalam menjustifikasi kelompok mana yang bersalah dan dikucilkan relasi sosial-politiknya. Ketiga, modernisasi dijalankan supaya pengaruh etnis dan agama merosot. Keempat, negara mengatur supaya jangan ada yang tumpang tindih antara agama dan suku. Karena dengan

cara ini persatuan tidak pernah ada dan pemerintah pusat tidak terancam.

Keempat kebijakan diatas, mempunyai implikasi politis yang sangat besar dalam pengelolaan relasi pusat dengan daerah, pemerintah dengan rakyatnya. Karena itu gairah etnisitas dan agama tidak lagi menjadi tempat orang mengespresikan diri secara politik dan mengungkapkan diri secara budaya, tetapi akan berubah menjadi tempat orang menyembunyikan diri secara politik dan mencari keamanan diri secara budaya.

Pilihan politik maupun budaya masyarakat menutup diri merupakan jalan terbaik dalam mengikuti jejak langkah politik kekuasaan Orde Baru. Karena itu ketika Negara sudah mengalami pelemahan basis materialnya maka masyarakat meminjam istilah Henk (2007) mencari *perlindungan pada kelompok agama maupun etnistas*. Pencarian perlindungan masyarakat kepada etnisitas maupun agama cepat atau lambat akan membahayakan posisi pemerintah dalam bangunan relasi vertikalnya tetapi juga rawan, rentan, penuh resiko dan sangat berbahaya dalam relasi horizontalnya.

Ternyata, dugaan ini benar adanya. Aneka konflik yang terjadi di ranah lokal, pada 1995-an hingga Orde Baru rontok membuktikan betapa dahsyatnya kekerasan politik di tanah air. Benturan yang berbau politik identitas tidak hanya mempermalukan para penguasa tetapi juga para cendekiawan-ilmuwan yang selama ini merasa optimis bahwa agama, ras dan suku bangsa akan segera hilang kekuatannya karena sudah mengalami pencerahan dan kemajuan. Pada kenyataannya optimisme itu meleset karena mereka lupa bahwa sentimen-sentimen primordial yang sejak semula telah ada dan akan selamanya tetap bertahan—bahkan identitas kelompok akan mengguncang tatanan politik yang selama ini diduga kokoh bangunannya.

Pengamatan Lucian W Pye (1993) terbukti, guncangan politik karena ledakan politik etnisitas sudah kita rasakan pengaruhnya. Celaknya negara absen dalam melindungi warganya. Hal ini nampak dalam pertikaian Dayak-Madura, peristiwa kekerasan politik Mei 1998 di Jakarta, pengusiran etnis Buton-Bugis dan Makassar (BBM) di Ambon.

Selain berbau kekerasan sebagaimana dijelaskan di atas politik etnisitas juga hadir dan mengental dalam era politik desentralisasi. Pencarian politik etnisitas, baik kolektif maupun individual menjadi sumber paling mendasar dan bermakna untuk menduduki jabatan-jabatan strategis di

daerah. Karena itu, para politisi di daerah sedang sibuk membangun masa lalu yang mereka miliki, lalu energi mereka kerahkan untuk memproyeksikan bangunan masa lalu itu ke masa depan guna memperkuat rasa dan perasaan atas etnisitas mereka. Dengan demikian, gerakan dapat “diperluas” dan “dilestarikan” dengan pagar-pagar pembatas untuk dapat dirayakan sembari menjaga jarak dengan orang lain yang berbeda dengan mereka.

Realitas empiris dari gerakan politik etnisitas menemukan relevansinya di beberapa daerah, misalnya politik etnisitas yang mengandalkan mobilisasi massa dengan tujuan akhir adalah perampasan kekuasaan muncul dalam mengiringi politik desentralisasi dengan lahirnya konsepsi putra daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka sebagai cara untuk melakukan analisa sehingga diperoleh hasil yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sebuah argumentasi perlu didukung dengan data dan kajian ilmiah agar bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itulah maka penelitian ini menggunakan studi pustaka untuk mendukung argumentasi yang dibangun.

HASIL DAN ANALISIS

1. Praktek Politik Etnisitas Era Orde Baru

Sekalipun Orde Baru sangat terkenal kuat dalam menjalankan roda pemerintahan bukan berarti pemerintah ini tanpa gejolak. Kekecewaan masyarakat lokal terhadap pemerintah mempercepat munculnya bibit ketegangan yang dikonsolidasikan dalam bentuk politik identitas. Di Irian misalnya, kecemburuan masyarakat setempat begitu tajam dalam tubuh birokrasi. Sementara di Riau, isu putra daerah semakin mengemuka. Dambaan supaya daerahnya dipimpin oleh putra daerah sendiri sangat diimpikan dan merasuk dalam perjuangan politik bagi politisi daerah.

a. Dominasi Pendatang dalam Birokrasi: Kasus Papua

Cerita Irian adalah cerita tentang ketidakberdayaan—keterbelakangan penduduk aslinya. Ketidakberdayaan atau keterbelakangan entah disengaja atau tidak mempunyai implikasi pada posisi dalam pemerintahan. Bahkan realitas menunjukkan terjadinya penguasaan birokrasi oleh kaum

pendatang. Hal ini dibenarkan Syansuddin Haris (1999) dalam *Indonesia di Ambang Perpecahan*. Ia menulis:

Selama bergabung dengan Indonesia dominasi birokrasi etnis non Irian terjadi baik di Provinsi maupun di Kabupaten. Implikasinya adalah peranan orang-orang Irian dalam pengambilan keputusan mengenai mereka sendiri terasa termarginalkan. Pembinaan aparatur dari pusat maupun daerah dipandang tak menghasilkan putra daerah Irian. Bahkan pejabat di Pemda maupun di Kantor Wilayah Departemen Teknis di Daerah Provinsi dan Kabupaten ternyata diisi oleh orang-orang non Irian. Dominasi non-Irian ini pada akhirnya hanya menghasilkan kebijakan, penyelesaian masalah politik dan sebagainya yang cenderung mengabaikan kepentingan rakyat Irian.

Dominasi semacam ini melahirkan dua bentuk kekecewaan. Pertama, membangkitkan rasa solidaritas yang merupakan perasaan terintegrasi yang dialami oleh segenap individu sebagai bagian dari suatu kelompok. Kedua, Kekecewaan itu pada akhirnya diekspresikan meminjam Syamsuddin Haris “*dengan keinginan memisahkan diri dari NKRI*”. Atau gerakan rakyat pribumi yang menuntut merdeka dari Indonesia. Implikasinya adalah para penduduk asli mengeksploitasi kebijakan pemerintah yang tak berkeadilan, lalu mereka mencari legitimasi historis tentang ketidakabsahan penggabungan Irian dengan bumi Indonesia. Usaha mempersoalkan legitimasi bisa dibaca sebagai usaha membangun politik kesukuan dalam kerangka mendapatkan akses dan pembagian sumberdaya baik ekonomi maupun politik.

Sumber daya di bidang politik nampak dengan munculnya usulan bahwa seluruh struktur dan lembaga politik di Irian Jaya, baik eksekutif maupun legislatif—80% harus dikuasai oleh orang-orang Papua sehingga perasaan sebagai bagian dari Indonesia tidak akan pernah hilang dan mereka bisa memainkan peran yang besar dalam pengambilan keputusan diberbagai bidang. Lebih lanjut disebutkan bahwa sistem ini berfungsi secara efektif dengan berpartisipasi orang-orang Papua untuk menghilangkan pikiran dan perasaan negatif. Ditambahkan pula dengan munculnya gerakan dari pejabat pemerintah setempat akan ‘pentingnya menjadi tuan di atas tanah sendiri’.

b. *Isu Putra Daerah Di Riau*

Sudah lama memang isu putra daerah berhembus dalam perebutan kekuasaan di ranah lokal. Menurut Ryaas Rasyid fenomena ini sudah mulai nampak pada era 1990-an dengan merujuk pada:

“... kecenderungan beberapa daerah untuk mengutamakan putra daerahnya dalam proses rekrutmen untuk jabatan-jabatan pemerintahan. Inilah adalah gejala yang sudah mulai tumbuh sejak awal tahun 1990-an, walaupun pada masa itu perhatian masyarakat di daerah lebih banyak terfokus kepada figur calon kepala daerah (gubernur, bupati, walikota). Jakarta sendiri, keinginan masyarakat Betawi untuk memperoleh gubenur dari kalangan mereka sendiri sudah sejak lama. Hal yang serupa juga melatarbelakangi pengantian gubernur Bangkulu, Jambi, Sulawesi Tengah, Irian Jaya, Maluku dan Riau, untuk menyebut beberapa kasus, dari figur yang sebelumnya bukan kalangan ‘putra daerah’ ke figur baru yang putra daerah”.

Dari sekian banyak jumlah daerah yang ngotot mengusung putra daerah adalah Riau akan dijadikan objek kajian dalam tulisan ini. Yang merupakan representasi dari masa pemerintahan Orde Baru. Alasannya adalah karena daerah ini mempunyai bobot perlawanan yang kuat dan unik terhadap pemerintah pusat sekalipun perlawanan Riau berakhir dengan kekalahan.

Kekalahan Riau melawan Pusat bermula pada keinginan sebagian besar politisi dan masyarakatnya untuk menjadikan putra daerahnya sebagai gubernur. Keinginan ini sudah lama digaungkan oleh para politisi daerah dan menemukan momentumnya pada bulan September 1985, yang waktu itu Ismail Suko adalah putra daerah yang menjadi salah satu calon gubernur, karena periode Imam Munandar sudah habis satu periode dan mau memasuki periode kedua. Ismail Suko yang pada waktu itu menjabat sebagai Sekretaris Dewan. Sekalipun jabatannya hanya Sekwan, Ismail punya dukungan yang kuat, baik di DPRD maupun masyarakat luas. Dua entitas inilah yang punya peran penting dalam mendesak pemerintah pusat supaya mendukung Ismail. Kuatnya arus dukungan dari DPRD nampak ketika anggota DPRD, melakukan kudeta terhadap Imam Munandar yang mendapat dukungan dari Golkar, Beni Murdani dan Soeharto namun dalam pemilihan DPRD memenangkan Ismail Suko. Sembilan belas orang dari Golkar membelok dan memberikan suaranya untuk Ismail Suko.

Ismail Suko menang dalam proses demokrasi prosedural. Kemenangan secara demokratis ini mendapat penolakan yang serius oleh pemerintah. Dengan segala cara pemerintah pusat termasuk Beni Murdani dan Soeharto waktu itu menekan daerah supaya Ismail Suko mengundurkan diri. Bahkan dengan menghalalkan segala cara pun dilakukannya. Misalnya dengan menggunakan militer, polisi dan termasuk berbagai preman dimanfaatkan untuk menteror, menekan sampai mengancam dengan senjata. Perilaku penggunaan kekerasan semacam ini membuat dendam politik Orang Melayu terhadap Jakarta.

Bagi penulis peristiwa politik Riau bisa dipandang sebagai ‘pemberontakan’ terhadap pusat di bawah rezim yang represif waktu itu, Riau berani ‘melawan’ kehendak pusat dan mendukung ‘putra daerah’ sebagai calonnya sendiri. Atau bisa juga kita tafsirkan sebagai ekspresi kekesalan masyarakat lokal terhadap kesewenang-wenangan pusat

2. Reformasi Dan Menguatnya Politik Etnisitas

Politisasi etnis menguat kembali semenjak reformasi digulirkan dan desentralisasi politik dijalankan. Syarif Ibrahim Alqadri, Sosiolog dari Universitas Tanjungpura secara tegas mengatakan bahwa era reformasi yang mengantarkan bangsa ini ke arah keterbukaan, demokratisasi, otonomi daerah dan desentralisasi telah melahirkan kembali dan memperkuat kesadaran etnis. Dan, kesadaran etnis yang bersifat keluar yang melahirkan etno nasionalisme, dan keinginan bebas dari penguasaan dominasi dan eksploitasi pemerintah pusat. Jika Alqadri mengajukan tesisnya bahwa kesadaran etnis melahirkan keinginan bebas dari penguasaan dominasi dan eksploitasi. Maka Arrochman Mardiansyah membalik logika itu dengan mengatakan bahwa kebangkitan kembali kesadaran politik etnik mengandung keunikan, originalitas, kecil sebagai fondasi baru bagi sebuah pengaturan politik yang “adil” dan “absah”

Kerangka pikir Mardiansyah patut diberi catatan. Sebab realitas politik menunjukkan bahwa penguatan kesadaran politik etnisitas di beberapa daerah sama sekali berbeda dan tidak menunjukkan terbangunnya fondasi baru yang mengarah pada pengaturan politik yang adil. Tetapi, justru sebaliknya. Dalam artian menguatnya kesadaran politik etnisitas memungkinkan terjadinya pengusuran—pengambilalihan—dan

pemonopolian jabatan-jabatan strategis di ranah lokal.

a. Isu Putra Daerah di Kalimantan Barat

Semenjak reformasi digulirkan di Kalbar terjadi kebangkitan politik etnisitas yang diperankan antarelit Dayak dan Melayu. Kebangkitan dan keberhasilan etnis Dayak membuat etnis Melayu cemas. Mereka khawatir akan ditinggal-dimusuhi dan dilewati oleh orang-orang Dayak yang sedang bergerak menuntut supaya putra daerah menjadi pemimpin kepala daerah.

Tuntutan ini meskipun pada awalnya datang dari etnis Dayak namun dikalangan Melayu juga merespon sama. Kesamaan persepsi dan tujuan pada pembuat Akhirnya dikalangan elit politik dari kedua etnis tersebut memutuskan untuk membagi kekuasaan. Khususnya jabatan bupati untuk masing-masing etnis. Jadi, ada semacam *power sharing*. Dalam prakteknya, apabila orang Dayak menjadi bupati, maka orang Melayu ditempatkan sebagai wakilnya—begitu pula sebaliknya. Hal ini sudah terjadi di Kab. Sintang dan Ketapang.

Penjelasan yang sama juga dibenarkan Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken (2007) dalam bukunya *politik Lokal di Indonesia*. Menurutnya:

“Semenjak pemilihan Bupati 1999 telah terjadi power sharing antara orang-orang Melayu dan Dayak. Kedua kelompok etnis berhasil mencapai pengertian mengenai daerah kuasa mereka masing-masing. Dalam kabupaten yang mempunyai satu kelompok etnis dominan, bupatinya berasal dari kelompok etnis tersebut. Itulah yang terjadi di Bengkayang dan Landak yang didominasi Dayak, dan di Sambas dan Pontianak yang didominasi Melayu. Di kabupaten-kabupaten dengan komposisi etnis berimbang, misalnya di Ketapang dan Kampuas Hulu, yang diharapkan adalah kepemimpinan campuran”.

Sementara pengamat yang lain mengatakan, bahwa di Sanggau, Bengkayang dan Pontianak ada asumsi yang berkembang bahwa kalau pemerintahan dipegang oleh orang Dayak-Melayu, segala urusan bisa selesai. Dari penjelasan ini jelas bahwa yang terjadi adalah perimbangan etnisitas. Sebuah solusi politik jangka pendek, yang dalam perjalanannya menemukan beberapa kendala. Ambil contoh pada bulan Oktober 1999, sebelum pemilihan Anggota Faksi Urusan Daerah di MPR sudah ada kesepakatan untuk memilih dua orang Melayu, dua orang Dayak dan satu dari etnis China. Pembagian diyakini sebagai cerminan jumlah suku

dan kekuatan masing-masing di Kalbar. Namun apa yang terjadi? Yang terpilih adalah orang Dayak Islam di kalangan Dayak. Akibatnya, gedung DPRD di Pontianak di demo dan nyaris dibakar. Orang Melayu dan Dayak bentrok. Untungnya kerusuhan ini dapat dipadamkan dan tidak disebarluaskan.

b. Isu Putra Daerah di Kalimantan Tengah

Apa yang terjadi di Kalbar juga terjadi di Kalimantan Tengah (Kalteng). Hanya saja penguatan politik etnisitas di Kalteng dimonopoli oleh etnis Dayak untuk menghalau orang pendatang. Karena itu isu putra daerah dikampanyekan secara massif. Hal ini terjadi karena orang-orang Dayak merasa disingkirkan secara sistematis yang notabene ‘penduduk asli’ Kalteng. Bahkan Orang-orang Dayak dibikin sedemikian rupa untuk tinggal dan menjadi penonton ketika alam dan kampung halaman mereka dijarah oleh pemimpin yang datang dari luar. Karena itu ide agar putra daerah menjadi tuan di kampung sendiri menjadi suatu keharusan sejarah.

Implementasi tentang pentingnya putra daerah menjadi pemimpin menyebar begitu cepat di kawasan Kalteng. Bahkan masyarakat Dayak dengan gagah perkasa menggugat dan menolak eksistensi Warsito Rusman menjadi gubernur Kalteng, itu dikarenakan selain dipaksakan dari atas, juga tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat Kalteng. Karena itu tampilnya Teras Narang selaku Gubernur Kalteng tidak hanya disambut dengan suka duka karena memenuhi hajak orang Dayak tetapi juga merupakan babak baru untuk melebarkan penguasaan jabatan-jabatan bupati oleh putra daerah di beberapa kabupaten.

Di Kota Waringin Barat (Kobar) geliat putra daerah sangat kencang diperjuangkan. Harian *Kalteng Post* memberitakan: “berikan kesempatan kepada putra daerah Kobar untuk menjadi pemimpin di daerahnya sendiri”. Selanjutnya, “tokoh masyarakat yang bertemu Pangdam Mayjen SM Suwisma, meminta agar mengabdikan dan merestui keinginan masyarakat Kobar yang menghendaki seorang pemimpin bupati dari putra daerah”.

Pemaksaan kehendak untuk menampilkan putra daerah dinilai sangat emosional dan sentimen kedaerahan sangat menonjol dalam mengikuti ritme proses-proses politik di tingkat lokal. Keinginan untuk menaklukan kekuasaan begitu besar pengaruhnya dalam dinamika lokal di Kalteng.

Hanya saja yang perlu diwaspadai adalah muncul petualang politik yang ikut bermain dengan mengobarkan semangat era putra daerah.

c. Isu Putra Daerah di Riau

Kekalahan putra daerah Riau pada masa Orde Baru tidak menyurutkan langkahnya untuk tetap memperjuangkan isu putra daerah. Isu putra daerah di Riau menjadi bahan diskusi politik paling hangat. Bahkan isu putra daerah bukan hanya milik pada tingkatan elit, tapi juga merembes pada tingkatan masyarakat akar rumput. Eporia masyarakat Riau terjadi ketika berhasil mendudukkan putra daerah menjadi gubernur pasca rontoknya kekuasaan Soeharto.

Tatkala jabatan gubernur di pegang putra daerah, berlahan-lahan tapi pasti orang-orang Riau menginginkan jabatan bupati. Sekarang gubernur-bupati sudah berada ditangan putra daerah. Itu pun dianggap belum puas oleh gerakan putra daerah akhirnya masuk di jabatan Camat maupun Desa. Ternyata orang Riau juga rakus kuasa. Setelah pucuk-pucuk pimpinan secara vertikal dikuasai oleh putra daerahnya. Penguasaannya pun terus diperlebar dan diperbesar dengan target selanjutnya adalah jabatan-jabatan termasuk di dinas, kabag dan kantor serta merambah ke perusahaan-perusahaan swasta pun direbut oleh mereka.

Gerakan putra daerah di Riau merupakan gambaran tingginya politisasi 'isu putra daerah' untuk menguasai semua lini jabatan-jabatan strategis baik di level pemerintahan maupun level swasta. Gerakan ini tergolong dahsyat dalam pengelolaan politik desentralisasi.

d. Isu Penguasaan Sumber Daya Ekonomi

Perkembangan ekonomi pasar berskala global dewasa ini telah mendorong berbagai kelompok masyarakat kembali bernaung dalam ikatan tradisi dan solidaritas yang lingkungannya lebih kecil. Misalnya kesukuan, agama, kedaerahan dan berbagai golongan berdasarkan strata ekonomi, muncul dan mengekspresikan tuntutanannya tanpa kompromi, melawan segala objek atau kekuasaan yang dianggap mengganggu kelangsungan hidupnya.

Untuk kasus Kalimantan Barat yang mayoritas masyarakatnya etnis Dayak telah lama melakukan perlawanan terhadap perusahaan. Sentimen

etnis Dayak terhadap perusahaan yang mengesplotasi hutan sudah berlangsung. Bahkan perlawanannya pun dengan menggunakan kekerasan sebagaimana ditulis oleh Pratikno. *Pertama*, melalui pengrusakan dan pembakaran *base camp*, jembatan dan fasilitas perusahaan oleh masyarakat setempat ketika pemerintah daerah dan PT Lingga Tejawana tidak peduli dengan tuntutan mereka. *Kedua*, pembakaran kantor utama, gudang, perumahan karyawan, bengkel, generator dan alat-alat berat, milik PT Bantana Jiaya karena tidak kunjung merealisasikan janji mereka terkait dengan pelibatan warga dalam penanaman sawit dan kredit kepada masyarakat.

Karakter keras orang-orang Dayak dalam mengekspresikan tuntutannya sangat berbeda dengan masyarakat Riau. Perjuangan masyarakat Riau untuk mendapatkan hak-hak ekonomi yang lebih adil dilakukan dengan cara terorganisir dan damai. Meskipun pemintaannya tidak mudah dikabulkan oleh pemerintah pusat tetapi semangat dan tekanan lokal terus dilakukan untuk memaksa pusat merealisasikan permintaannya. Hasilnya cukup mengesankan dalam RAPBD Riau 1999 mendapat 251 miliar meningkat pada tahun 2000 menjadi 756 miliar. Seiring dengan berjalannya waktu di bawah kepemimpinan sang putra daerah Saleh Djasit pemasukan Riau bertambah besar yakni 3,9 triliun. Pemasukan ini sangat wajar dan cukup berasal karena Riau adalah salah satu daerah kaya sumberdaya alamnya.

3. Menata Politik Etnisitas

Kebangkitan politik etnisitas di ranah lokal sebagaimana dijelaskan di atas, tentu saja butuh pencermatan yang lebih serius. Karena kalau tidak, akan terjadi gesekan dan pertentangan yang maha dahsyat untuk Indonesia ke depan. Karena itu Indonesia yang plural dari sisi etnisitas menimbulkan pertanyaan dapatkan masyarakat yang multi-etnik ada tanpa konflik yang berarti dikalangan kelompok-kelompok etnis yang berbeda?

Jawaban atas pertanyaan di atas adalah demokrasi konsosiasional. Karena demokrasi konsosiasional menyarankan agar semua aktor yang ada di dalam masyarakat melakukan kerjasama antara etnisitas. Demokrasi konsosiasional mengharapkan berbagai kelompok etnis itu saling merembes secara teritorial dan genetika. Sedangkan dari sudut pandang

politik Demokrasi konsosiasional berusaha menciptakan suasana harmonis antar etnis dengan menerapkan dua nilai penting, yakni. *Pertama*, tidak terdapat susunan kelompok hirarkis sehingga tidak ada kelompok yang dominan atau yang mengeksploitir yang lainnya. *Kedua*, terdapat pembagian kekuasaan politik yang sama dan semua kelompok etnis terwakili secara proporsional di dalam struktur kekuasaan.

Dua nilai yang ditawarkan dalam demokrasi konsosiasional tentu saja membutuhkan prasyarat dan aturan main yang harus ditaati oleh semua komunitas yang begitu plural pembilahan SARA-nya di beberapa lokal. Ada empat prasyarat menurut Lijphart (1997) dalam mempraktekkan demokrasi konsosiasional di ranah lokal. *Pertama*, kemampuan dan kemauan untuk mengakui bahaya-bahaya instabilitas yang merupakan inheren dalam masyarakat yang tingkat fragmentasi dan polarisasi sosialnya tinggi. *Kedua*, memerlukan adanya komitmen untuk memelihara *nation-state* yang ada. Artinya para tokoh masyarakat harus mempunyai keinginan untuk mencegah adanya kemungkinan disintegrasi daerah. *Ketiga* ada kemampuan untuk mengangkat persoalan antar sub kultur masing-masing *cleavages* ke tingkat yang lebih tinggi. Keempat ada kemampuan untuk menempa usaha mencari penyelesaian yang tepat guna memenuhi tuntutan dari masing-masing sub kultur, dengan ditemukannya aturan main yang jelas serta pada tingkat kelembagaan yang tepat.

Aturan main merupakan hal yang sangat esensial dalam demokrasi konsosiasional. Adapun aturan mainnya mencakup: *Politics is not a game, it is a business*. Artinya proses politik hendaknya ditujukan untuk mencapai hasil, bukan untuk melihat siapa yang kalah dan yang menang; *Agree to disagree*. Artinya setiap sub kultur harus mengakui ada perbedaan yang tajam dalam hal-hal tertentu, misalnya ideologi, sehingga tidak perlu ada pemaksaan dari satu ideologi atas ideologi yang lain; *Summit mooting*. Yang dimaksudkan disini adalah diplomasi pada tingkat puncak. Memang akan ada peranan yang besar dari para pemimpin, akan tetapi hal ini ditujukan untuk meredam konflik sehingga tidak meluas. Peranan mereka adalah menemukan persamaan supaya tercapai konpromi; *Proportionality*. Artinya sub-kultur akan memperoleh porsi kekuasaan dan konsekuensi-konsekuensinya sesuai dengan proporsi kekuatan yang dimiliki; *Depolitization*. Artinya, bahwa dalam memberikan argumen hendaknya

argumen. tersebut tidak selalu diwarnai oleh sentimen politik agar emosi massa dapat diredam; *Secrecy*. Maksudnya adalah bahwa para tokoh harus mampu membatasi dan menjaga kerahasiaan dari apa yang telah diputuskan tidak perlu dibawa ke masyarakat, dengan demikian sentimen politik dapat dikurangi dan negosiasi mudah untuk dilaksanakan.

Model demokrasi konsosiasional ala Arend Lijhart (1997) cocok untuk pengelolaan politik identitas Indonesia ke depan. Tawaran ini membuka kebekuan dan sekat-sekat politik primordial sedang marak di ranah lokal. Pengadopsian demokrasi konsosiasional akan mengikis pandangan oposisi biner yang selama ini dijalankan oleh para elit untuk menggapai kekuasaan bisa diminimalisir. Politik itnisitas yang di bangun di atas fondasi politik perbedaan tidak lagi sebagai sesuatu yang terpisah atau dari yang lain dan masing-masing berdiri sendiri. Homi K Bhabha menganjurkan terjadi ruang negosiasi identitas cultural yang mencakup perjumpaan dan pertukaran budaya untuk menghasilkan pengakuan timbal-balik.

Tawaran Bhabha menarik, hanya saja belum terbukti. Sementara tawaran Arend Lijhart dengan demokrasi konsosiasional terlepas dari cacat bawaannya sudah teruji dalam penataan politik identitas khususnya di Eropa Barat, misalnya di Negara Kanada, Belgia dan Swis. Bahkan Van den Berghe mengemukakan bahwa Swis adalah contoh terbaik bagi keharmonisan etnisitas. Selanjutnya dengan nada berkelar Van den Berghe mengatakan “jika negara ini tidak ada, maka negara ini perlu ditemukan”. Ia berkata demikian karena kemampuan Swis dalam menata negaranya yang multi etnis.

KESIMPULAN

Penguatan politik etnisitas merupakan potret diri dari pergulatan politik lokal. Sebuah potret yang berwajah ganda. Wajah pertamanya berwujud dengan putra daerah sebagaimana terjadi di Kalimantan Barat, Riau, Papua dan Kalimantan Tengah, tetapi wajah lainnya dari politik identitas bisa berwujud pada perjuangan untuk mendapatkan alokasi dana dari pemerintah pusat. Dimana proses desentralisasi politik ternyata diiringi dengan isu putra daerah. Sebuah isu yang sarat makna dan sangat mengkhawatirkan bukan hanya proses demokrasi lokal akan terancam,

tetapi juga menjadi petunjuk memudarnya semangat nasionalisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Afan Gaffar.1990. "Teori Empirik Demokrasi dan Alternatif Pemikiran tentang Pelaksanaan Demokrasi Pancasila" dalam Akhmad Zaini Abar (peny) *Beberapa Aspek Pembangunan Solo: Ramadhani*
- Cornelis Lay. 2003. 'Otonomi Daerah dan Keindonesiaan' dalam A. Gaffar Karim (ed) *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar dan Ilmu Pemerintahan, UGM,
- Donald L Morowitz.1998. "Demokrasi Pada Masyarakat Majemuk". Dalam Larry Diamond dan Mars F Plattner. *Nasionalisme, Konflik Etnik dan Demokrasi Bandung*. ITB Pres.
- Gerry Van Klinken.2007. *Peran Kota Kecil*. Jakarta. YOI dan KITLV.
- Henk S Nordholt. 2007. "Less State, more Democracy". *Kuliah Umum yang diselenggarakan JIP dan S2 PLOD di Fisipol UGM pada tanggal 27 April*.
- Henk Schulte Nordholt dan Gerry Van Klinken. 2007. *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta. YOI.
- Jumadi. 2003. "Fenomena Etnis Dalam Proses Rekrutmen Elit Politik Lokal: Kasus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Kalbar 2000-2005". Yogyakarta. *Tesis S2 UGM*.
- Kemala Chandakirana. 1989. "Geertz dan Masalah Kesukuan". *Jakarta. Prisma No. 2/1989*.
- Lucian W Pye. 1993. "Pengantar". Dalam Harold R Isaacs. *Pemujaan Terhadap Kelompok Etnis* Jakarta YOI.
- Syamsuddin Haris (ed.). 1999. *Indonesia di Ambang Perpecahan*. Jakarta. Erlangga.
- Siti Zuhro. 1999. "Riau dan Otonomi Daerah". Dalam Syamsuddin Haris (ed.,). *Indonesia di Ambang Perpecahan*, Jakarta. Erlangga.
- Ubed Abdilah.2002. *Politik Identitas Etnis*. Magelang. IndonesiaTera